

Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan: Bukti Empiris dari Tingkat Kabupaten Kota di Indonesia

*Fiscal Decentralization and Governance Performance: Empirical Evidence from the District
City Level in Indonesia*

Septhia Astriana¹, Khoirunurrofik²

¹Badan Pemeriksa Keuangan RI

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat 10210

²Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

Jl. Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo UI Depok, Jawa Barat 16424

1Korespondensi: septhia.astriana@bpk.go.id

ABSTRAK

Kebijakan desentralisasi dipercaya dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan, namun penelitian yang mengkaji hubungan desentralisasi dengan isu tata kelola pemerintahan masih sangat terbatas. Studi ini bertujuan untuk menguji hubungan antara desentralisasi fiskal dengan kinerja tata kelola pemerintahan yang dievaluasi oleh SAKIP dengan menggunakan data panel yang dikumpulkan dari 508 kabupaten/kota di Indonesia antara tahun 2016 dan 2021. Indikator pendapatan dan pengeluaran digunakan dalam indikator desentralisasi fiskal. Penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran, memiliki dampak yang cukup baik terhadap kinerja tata kelola pemerintahan dengan menggunakan *Panel Ordered Probit Regression*. Studi sub-sampel mengungkapkan bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja tata kelola pemerintahan bervariasi tergantung pada apakah suatu yurisdiksi adalah kabupaten atau kota, dan apakah pemerintah daerah tersebut terletak di wilayah Jawa atau di luar Jawa. Dimana pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah daerah di luar Jawa lebih banyak terkena dampak desentralisasi fiskal.

Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Kinerja Tata Kelola Pemerintahan, *Panel Ordered Probit Regression*, SAKIP

ABSTRACT

Decentralization policies are believed to be able to improve government governance, but research examining the relationship between decentralization and governance issues is still very limited. This study intends to examine the relationship between fiscal decentralization and governance performance as evaluated by SAKIP using panel data collected from 508 districts/cities in Indonesia between 2016 and 2021. Revenue indicators and expenditure indicators are used in the fiscal decentralization indicator. This study shows that fiscal decentralization, both in terms of revenue and expenditure, has a considerable favorable impact on governance performance using the Panel Ordered Probit Regression. The sub-sample study reveals that the impact of fiscal decentralization on governance performance varies depending on whether a jurisdiction is a district or a city, as well as whether it is located in the Java area or outside Java. Where district regional governments and regional governments outside of Java are more affected by fiscal decentralization.

Keywords: Fiscal Decentralization, Governance Performance, Panel Ordered Probit Regression, SAKIP

JEL classification: H11, C23, H50, H77

PENDAHULUAN

Komponen umum dari strategi pembangunan negara-negara berkembang yaitu desentralisasi atau pelimpahan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah yang lebih rendah (Vel & Bedner, 2015; Mudalige, 2019; Martinez-Vazquez et al., 2017). Desentralisasi merupakan kebijakan dari beragam dimensi meliputi unsur fiskal, administratif dan politik dimana dalam pelaksanaannya dilakukan di berbagai tingkat pemerintahan yang saling kait mengait antara satu dengan yang lain (Canare, 2021; Martinez-Vazquez et al., 2017).

Desentralisasi telah menjadi eksperimen kebijakan utama untuk memperbaiki mutu layanan masyarakat, meningkatkan tata kelola pemerintahan, memperbaiki kesejahteraan rakyat dan mengurangi kemiskinan (Sujarwoto, 2015). Bagian penting dari desentralisasi adalah desentralisasi fiskal karena ketika ada penyerahan kewenangan dan tanggungjawab maka harus diikuti dengan penganggaran untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab tersebut, hal ini merupakan prinsip *money follows function* (Bahl, 1999).

Salah satu fungsi utama desentralisasi adalah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Sejumlah literatur empiris menunjukkan dampak positif dari tata kelola pemerintahan yang baik dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Linawati et al., 2021; Rusydi & Rossieta, 2015), dalam meningkatkan kinerja dan mengurangi inefisiensi belanja pemerintah (Wardhani et al., 2017), dalam meningkatkan Penanaman Modal Asing (Kyriacou et al., 2017; Drajat & Manzilati, 2015), serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Linawati et al., 2021; Kaufmann & Kraay, 2002). Sayangnya penelitian yang mengaitkan desentralisasi fiskal dengan konsekuensi politik (antara lain: tata kelola, akuntabilitas, dan korupsi) belum sebanyak penelitian yang mengaitkan desentralisasi fiskal dengan konsekuensi ekonomi (antara lain: pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta stabilitas fiskal) padahal secara spesifik kita perlu mengetahui efek bersih desentralisasi fiskal pada akuntabilitas dan

kendali pemilu (Martinez-Vazquez et al., 2017). Mendefinisikan tata kelola pemerintahan yang baik tidaklah mudah karena meliputi berbagai dimensi. Tetapi secara umum, konsep *good governance* lebih diartikan sebagai solusi dalam mewujudkan kinerja pemerintah yang efektif dan efisien (Handayani & Nur, 2019). Efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah telah menjadi sorotan selama ini. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama tahun 2021 menemukan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp1,76 triliun (BPK, 2022). Menteri Keuangan juga menyebutkan adanya permasalahan inefisiensi belanja daerah, dimana sebagian besar APBD digunakan untuk belanja operasional pemerintah daerah dan gaji pegawai yang sifatnya bukan untuk investasi (Liputan6, 2019). Studi empiris menyebutkan terjadi inefisiensi belanja pemerintah dimana belanja pemerintah tidak dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Wardhani et al., 2017). Berdasarkan hal tersebut penting untuk melihat hubungan desentralisasi fiskal dengan kinerja tata kelola pemerintahan.

Di Indonesia, pengukuran kinerja tata kelola pemerintahan dapat dikaitkan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan menurut Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014. Menurut Juanda et al., (2013) hasil penilaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan apakah belanja dilakukan secara ekonomis, efektif dan efisien.

Pengukuran kinerja dalam penelitian ini menggunakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikarenakan: a) aspek manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu bagian terpentingnya, dimana menurut Armstrong dan Baron (2000) sumber daya manusia adalah unsur utama dalam menentukan kesuksesan organisasi; b) evaluasi yang menyeluruh mulai dari aspek perencanaan dan perjanjian kinerja, pelaksanaan program dan

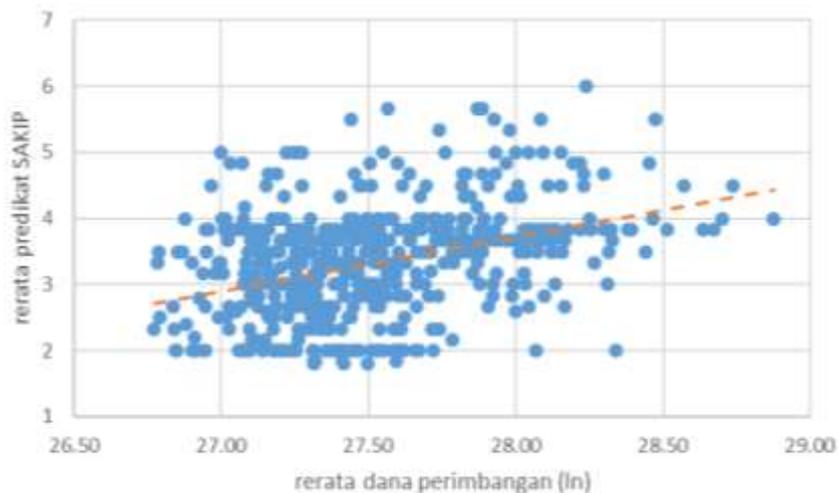
kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja; dan c) perbandingan dengan nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan bahwa SAKIP masih perlu ditingkatkan.

Gambar 1 dan Gambar 2 memperlihatkan analisis hubungan dana perimbangan dan belanja daerah dengan predikat SAKIP per kabupaten/kota dengan menggunakan rerata dana perimbangan dan belanja daerah tahun 2015-2021 serta rerata predikat SAKIP kabupaten/kota tahun 2016-2021. Terdapat hubungan positif antara dana perimbangan dan belanja daerah dengan predikat SAKIP. Pada gambar tersebut juga memperlihatkan variabilitas hubungan dana perimbangan dan belanja daerah dengan predikat SAKIP, walaupun daerah mendapatkan dana perimbangan dan atau merealisasikan belanja daerah dengan jumlah yang sama, pencapaian predikat SAKIP berbeda-beda. Berdasarkan hal ini hubungan desentralisasi fiskal dengan kinerja tata kelola pemerintahan masih belum jelas, dan perlu diteliti lebih lanjut.

Penelitian ini akan melakukan pengelompokan antar yurisdiksi (kabupaten dengan kota) dan regional (Jawa dan luar Jawa) agar terlihat perbandingan implementasi desentralisasi fiskal antar wilayah tersebut. Pengelompokan pulau Jawa dan luar pulau Jawa dipilih karena ketimpangan kinerja tata kelola

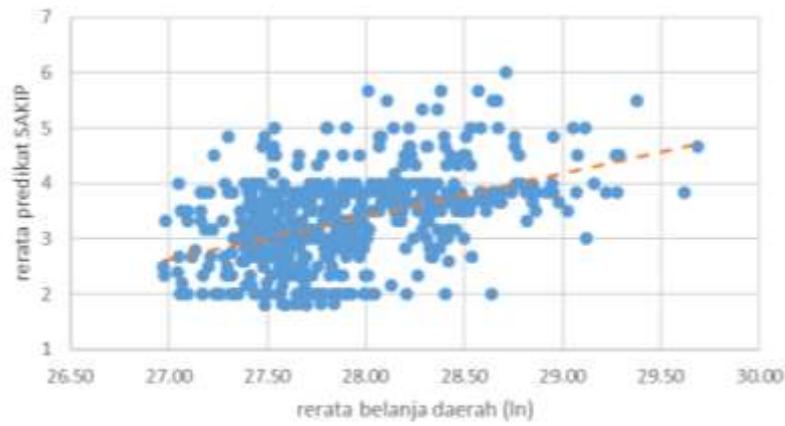
pemerintahan pulau Jawa dan luar pulau Jawa jauh lebih besar dibandingkan ketimpangan kinerja tata kelola pemerintahan kabupaten dan kota. Perbandingan kabupaten dan kota memperlihatkan dengan jumlah rerata belanja daerah yang sama tidak mampu menghasilkan rerata predikat SAKIP yang sama. Di sisi yang lain, perbandingan pulau Jawa dengan luar pulau Jawa memperlihatkan ketimpangan belanja daerah yang cukup jauh dan juga diikuti dengan ketimpangan rerata predikat SAKIP yang cukup jauh pula.

Penelitian ini akan melakukan pengelompokan antar yurisdiksi (kabupaten dengan kota) dan regional (Jawa dan luar Jawa) agar terlihat perbandingan implementasi desentralisasi fiskal antar wilayah tersebut. Pengelompokan pulau Jawa dan luar pulau Jawa dipilih karena ketimpangan kinerja tata kelola pemerintahan pulau Jawa dan luar pulau Jawa jauh lebih besar dibandingkan ketimpangan kinerja tata kelola pemerintahan kabupaten dan kota. Perbandingan kabupaten dan kota memperlihatkan dengan jumlah rerata belanja daerah yang sama tidak mampu menghasilkan rerata predikat SAKIP yang sama. Di sisi yang lain, perbandingan pulau Jawa dengan luar pulau Jawa memperlihatkan ketimpangan belanja daerah yang cukup jauh dan juga diikuti dengan ketimpangan rerata predikat SAKIP yang cukup jauh pula.



Sumber: Kemenkeu dan Menpan RB, 2022 (diolah kembali)

Gambar 1. Hubungan Dana Perimbangan dengan Pencapaian SAKIP dan Variabilitasnya

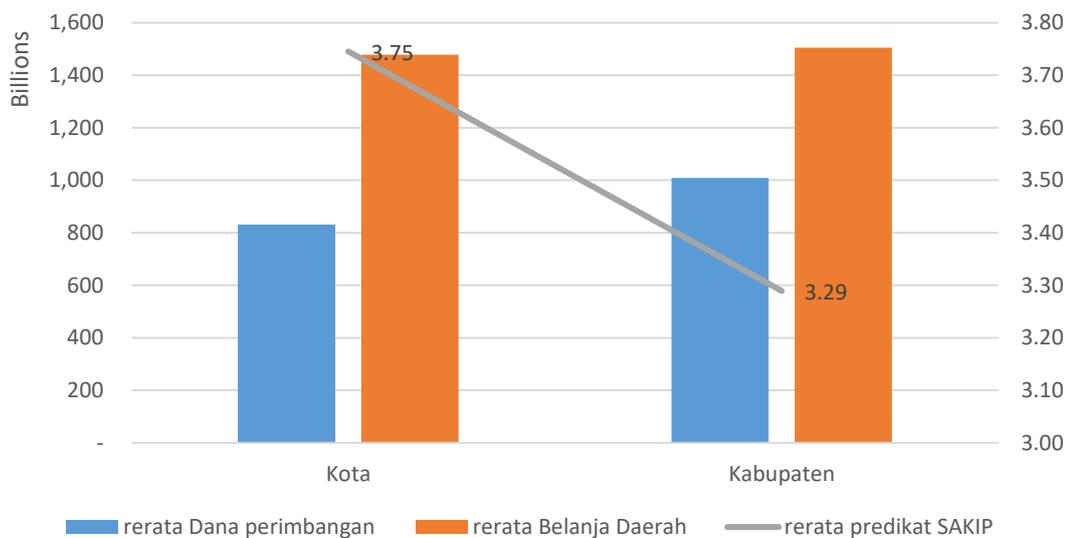


Sumber: Kemenkeu dan Menpan RB, 2022 (diolah kembali)

Gambar 2. Hubungan Belanja Daerah dengan Pencapaian SAKIP dan Variabilitasnya

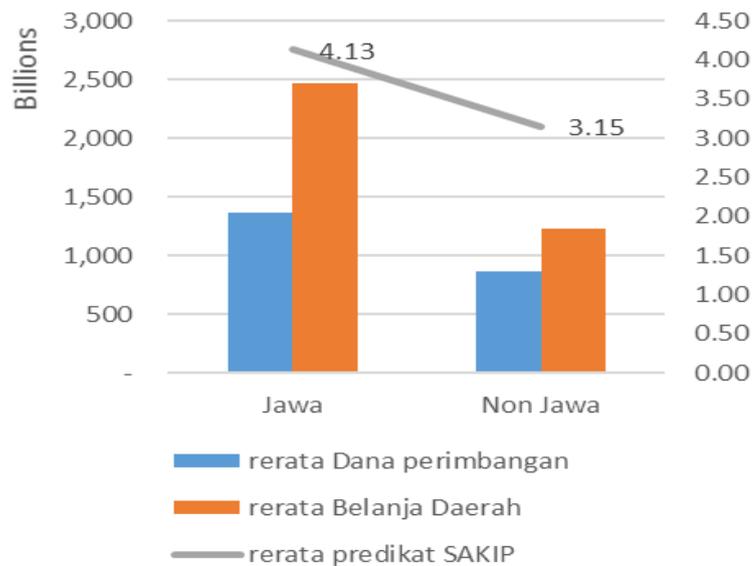
Dalam konteks Indonesia pun, penelitian desentralisasi fiskal dengan kinerja tata kelola pemerintahan masih sangat terbatas. Penelitian yang ada mengaitkan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tata kelola keuangan, hasilnya menyebutkan tidak terdapat pengaruh signifikan dengan menggunakan unit analisis kabupaten kota di Bali selama 5 tahun (Purbadharmaja et al., 2019), terkait pengendalian korupsi menunjukkan desentralisasi fiskal berdampak negatif dengan unit analisis kabupaten kota di pulau Jawa selama 3 tahun (Saputra & Setiawan, 2021). Penelitian lain, tidak secara spesifik mengaitkan desentralisasi fiskal dengan kinerja pemerintah, melainkan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah, dimana

hasilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah menggunakan unit analisis kabupaten kota se-Indonesia tetapi hanya 1 tahun (Rustiyaningsih & Immanuela, 2014), ketergantungan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah menggunakan unit analisis kabupaten kota di Sulawesi Selatan selama 4 tahun (Sedyaningsih & Zaky, 2012), Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah menggunakan unit analisis kabupaten kota provinsi se-Indonesia tetapi hanya 1 tahun (Saputra et al., 2018)



Sumber: Kemenkeu dan Menpan RB, 2022 (diolah kembali)

Gambar 3. Perbandingan jumlah dana perimbangan dan belanja daerah dengan pencapaian SAKIP pada Kota dan Kabupaten



Sumber: Kemenkeu dan Menpan RB, 2022 (diolah kembali)

Gambar 4. Perbandingan jumlah dana perimbangan dan belanja daerah dengan pencapaian SAKIP pada pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa

Oleh karena itu, berdasarkan bukti dan literatur yang ada, penelitian ini berusaha untuk memberikan bukti tambahan mengenai hubungan desentralisasi fiskal dengan kinerja tata kelola pemerintahan, khususnya bagaimana pengaruh variabel desentralisasi pendapatan dan belanja dalam mempengaruhi kinerja tata kelola pemerintahan pemerintah daerah. Untuk mengisi celah penelitian, studi ini akan: a) menggunakan unit analisis kabupaten kota se-Indonesia dalam kurun waktu 2016-2021; b) menggunakan indikator desentralisasi fiskal dari sisi pendapatan dan pengeluaran, karena menurut Canare (2021) terdapat perbedaan pengaruh antara desentralisasi pendapatan dan pengeluaran; dan c) menggunakan data SAKIP dimana data ini terpublikasi secara terbatas sehingga masih jarang digunakan. Selain itu, dikarenakan adanya keberagaman spasial, maka selain melakukan pengujian dengan seluruh sampel, juga akan dilakukan pengelompokan unit analisis berdasarkan yurisdiksi (kabupaten dan kota) serta regional (Jawa dan luar Jawa), hal ini mendukung hasil penelitian Canare (2021) dimana terdapat perbedaan pengaruh antara negara berpenghasilan tinggi dan negara berpenghasilan tidak tinggi.

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan studi ini ialah menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja tata kelola pemerintahan yang diukur melalui SAKIP pada kabupaten/kota di Indonesia dan mengidentifikasi

jika dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja tata kelola pemerintahan akan berbeda atau seragam antar yurisdiksi dan regional. Studi ini menggunakan data tahunan di tingkat kabupaten/kota di Indonesia dengan rentang waktu 2016-2021.

METODE

Data

Sumber data dalam penelitian ini, data desentralisasi fiskal berasal dari data realisasi APBD Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), data kinerja tata kelola pemerintahan merupakan data SAKIP berasal dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, kesejahteraan ekonomi dan ukuran pemerintah berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik.

Penelitian ini menggunakan analisis data panel. Data *time series* selama 6 tahun dari tahun 2016-2021 dan data *cross section* sebanyak 508 kabupaten/kota yang terdiri dari 416 kabupaten dan 92 kota. Jumlah observasi sebanyak 3.048, namun terdapat 102 observasi yang tidak dilakukan evaluasi sehingga jumlah observasi menjadi 2.946.

Metode Analisis

Dalam penelitian ini, variabel terikat bersifat kategori, dimana terdapat enam kategori yang berskala ordinal. Disebut berskala ordinal

karena kategorinya berurutan atau merupakan peringkat. Oleh sebab itu, untuk mengetahui seberapa besar keterkaitan atau hubungan antara variabel bebas dan variabel dependen menggunakan regresi probit ordinal. Model yang digunakan akan diuji menggunakan perangkat lunak STATA 16.

Untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja tata kelola pemerintahan pada kabupaten/kota di Indonesia menggunakan analisis regresi probit ordinal dengan sampel nasional. Sedangkan, untuk menguji dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja tata kelola pemerintahan antar yurisdiksi dan regional menggunakan analisis regresi probit ordinal dengan sub sampel nasional. Sub sampel nasional dibagi menjadi dua kelompok yaitu: kelompok yurisdiksi (kabupaten dan kota) serta kelompok regional (Jawa dan luar Jawa).

Spesifikasi Model

Dalam studi ini, perhitungan indikator desentralisasi fiskal mempertimbangkan sisi pendapatan dan sisi pengeluaran. Di sisi pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu pendapatan sendiri otonomi, bagi hasil antar daerah dan hibah antar daerah, ketiga kategori ini dihitung sebagai bagian dari pendapatan umum pemerintah yang terkonsolidasi. Sedangkan di sisi pengeluaran dihitung sebagai bagian dari pengeluaran umum pemerintah yang terkonsolidasi setelah dikurangi belanja transfer. Indikator ini merujuk pada pengukuran indikator desentralisasi fiskal yang dilakukan oleh Negara & Khoirunrofik, (2021).

Penelitian memasukkan empat variabel kontrol yang berpengaruh terhadap kinerja tata kelola pemerintahan, meliputi: a) kesejahteraan ekonomi pada suatu daerah menggunakan proksi Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) per kapita, b) ukuran pemerintah menggunakan proksi bagian konsumsi akhir pemerintah dari total PDRB, c) *dummy* tipe yurisdiksi yang membedakan kota dan kabupaten, dan d) *dummy* pulau yang membedakan Jawa dan luar Jawa.

Pada studi ini memasukkan model *fixed effect* untuk data panel. Model *fixed effect* digunakan dalam estimasi ini karena kemampuannya mengendalikan keragaman individu yang konstan antar waktu dan

kemampuannya mengendalikan faktor yang berubah antar periode tetapi konstan antar individu (Kyriacou & Roca-Sagalés, 2009).

Literatur yang ada telah membahas masalah endogenitas, ada hubungan saling mempengaruhi antara variabel desentralisasi fiskal dengan variabel kinerja tata kelola pemerintahan (Kyriacou et al., 2017). Kyriacou & Roca-Sagalés, (2009) juga telah gagal menolak hipotesis nol terkait eksogenitas variabel desentralisasi fiskal, kesejahteraan ekonomi dan ukuran pemerintah. Untuk mengatasi hal ini Kyriacou & Roca-Sagalés, (2009) menggunakan *lagged time* t-1 pada ke tiga variabel tersebut. Karena itu, penelitian ini juga menggunakan *lagged time* t-1 pada variabel desentralisasi fiskal, kesejahteraan ekonomi dan ukuran pemerintah. Pengujian menggunakan persamaan dan definisi operasional sebagai berikut.

$$Y_{i,t} = \alpha + \beta_1 PAD_{i,t-1} + \beta_2 DBH_{i,t-1} + \beta_3 DAU_DAK_{i,t-1} + \beta_4 BEL_{i,t-1} + \beta_5 PDRBKPT_{i,t-1} + \beta_6 GOVSZ_{i,t-1} + \beta_8 DYURISDIKSI_{i,t} + \beta_9 DPULAU_{i,t} + v_t + \eta_i + \varepsilon_{i,t}$$

1. Variabel dependen ($Y_{i,t}$) merupakan nilai SAKIP per kabupaten/kota i pada tahun t . Nilai SAKIP adalah nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan oleh evaluator Menpan RB. Nilai SAKIP per kabupaten/kota i pada tahun t menggunakan skala pengukuran ordinal enam kategori, yaitu: memuaskan diberi kode 6, sangat baik diberi kode 5, baik diberi kode 4, cukup diberi kode 3, kurang diberi kode 2, dan sangat kurang diberi kode 1.
2. Notasi α dan β masing-masing merupakan konstanta dan parameter dari variabel bebas.
3. Variabel $PAD_{i,t}$ merupakan rasio pendapatan asli daerah terhadap akumulasi atau konsolidasi pendapatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota per kabupaten/kota i pada tahun t .
4. Variabel $DBH_{i,t}$ merupakan rasio pendapatan bagi hasil terhadap akumulasi atau konsolidasi pendapatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah

- kabupaten/kota per kabupaten/kota i pada tahun t .
5. Variabel $DAU_DAK_{i,t}$ merupakan rasio pendapatan transfer dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap akumulasi atau konsolidasi pendapatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota per kabupaten/kota i pada tahun t .
 6. Variabel $BEL_{i,t}$ merupakan rasio pengeluaran terhadap pengeluaran pemerintah akumulasi atau konsolidasi (pengeluaran pusat setelah dikurangi belanja transfer, pengeluaran pemerintah provinsi, pengeluaran pemerintah kabupaten/kota) per kabupaten/kota i pada tahun t .
 7. Variabel $PDRBKPT_{i,t}$ merupakan rasio PDRB terhadap jumlah penduduk per kabupaten/kota i pada tahun t .
 8. Variabel $GOVSZ_{i,t}$ merupakan rasio pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terhadap PDRB per kabupaten/kota i pada tahun t .
 9. Variabel $DYURISDIKSI_{i,t}$ merupakan *dummy* untuk wilayah kota dan non kota/kabupaten. (0=kabupaten, 1=kota)
 10. Variabel $DPULAU_{i,t}$ merupakan *dummy* untuk wilayah Jawa dan luar Jawa. (0=luar Jawa, 1=Jawa).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Nasional

Untuk memahami bagaimana variabel bebas mempengaruhi variabel dependen, dilakukan estimasi *Maximum Likelihood* dengan analisis menggunakan *panel ordered probit regression*. Jumlah keseluruhan observasi adalah sebanyak 2.946. Uji *chi-square* ($\text{Prob} > \chi^2$) menghasilkan nilai 0,000 yang artinya bahwa seluruh variabel bebas yang digunakan di dalam model secara simultan mempengaruhi variabel terikat kinerja tata kelola pemerintahan. Kemudian nilai *Pseudo R²* untuk persamaan 3 yaitu desentralisasi fiskal dari sisi pendapatan dan pengeluaran adalah sebesar 0,7, yang artinya di

dalam model yang digunakan, variasi dari variabel kinerja tata kelola pemerintahan dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel bebas sebesar 70%. Estimasi dilakukan dengan 3 persamaan, persamaan 1 untuk desentralisasi fiskal indikator pengeluaran, persamaan 2 untuk desentralisasi fiskal indikator pendapatan, dan persamaan 3 untuk desentralisasi fiskal indikator pengeluaran dan pendapatan. Jika dilihat pada tabel 2 hasil regresi persamaan 3 relatif serupa hasilnya jika dibandingkan dengan persamaan 1 dan 2. Hasil estimasi dapat dilihat pada tabel 1.

Berdasarkan hasil estimasi tersebut, diketahui bahwa desentralisasi fiskal dari sisi pendapatan (DBH) dan pengeluaran (belanja) secara signifikan mempengaruhi kinerja tata kelola pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1 dimana variabel DBH dan belanja berkorelasi positif terhadap variabel kinerja tata kelola pemerintahan. Dari sisi pendapatan hanya DBH yang signifikan berpengaruh terhadap kinerja tata kelola pemerintahan, hal ini menandakan DBH yang digunakan sebagai alat pemerataan ketimpangan fiskal vertikal yaitu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah penting dalam meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan. Arah hubungan yang positif dikarenakan DBH merupakan salah satu komponen dari kemandirian fiskal, semakin besar proporsi DBH yang diperoleh akan mendorong kemandirian suatu daerah. Pendapatan sendiri otonomi atau PAD tidak berpengaruh signifikan, hal ini dikarenakan mayoritas pemerintah daerah memiliki PAD dengan nilai yang relatif rendah (Sedyaningsih & Zaky, 2012) sehingga pengaruh PAD terhadap kinerja tata kelola pemerintahan sangat kecil sekali. Hibah antar daerah atau DAU dan DAK juga tidak berpengaruh signifikan, hal ini dikarenakan peningkatan DAU dan DAK dari tahun ke tahun tidak signifikan sehingga pengaruhnya minim dalam meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan. Arah hubungan yang negatif dikarenakan DAU DAK merupakan komponen dari ketergantungan fiskal, semakin besar proporsi DAU DAK yang diperoleh mencerminkan makin tinggi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat..

Tabel 1. Hasil Estimasi *Panel Ordered Probit Regression*

	(1) Pengeluaran	(2) Pendapatan	(3) Pengeluaran & Pendapatan
lag_BELANJA	1.286*** (.393)		.948** (.424)
lag_GOVSZ	.057 (.668)	.353 (.655)	.041 (.669)
lag_PDRBKPT	-.031 (.623)	.051 (.62)	-.17 (.626)
lag_PAD		.14 (.167)	.03 (.174)
lag_DBH		.439*** (.12)	.383*** (.122)
lag_DAUDAK		-.074 (.069)	-.054 (.07)
DYURISDIKSI	3.039** (1.342)	2.684** (1.341)	2.866** (1.346)
DPULAU	3.609 (2.663)	5.168** (2.55)	3.429 (2.667)
/cut1	-10.558*** (3.729)	-6.455** (2.956)	-12.63*** (4.054)
/cut2	-4.98 (3.693)	-.913 (2.929)	-7.038* (4.017)
/cut3	-1.814 (3.693)	2.25 (2.93)	-3.874 (4.016)
/cut4	2.705 (3.693)	6.797** (2.932)	.682 (4.013)
/cut5	6.664* (3.701)	10.841*** (2.944)	4.732 (4.019)
Observations	2946	2946	2946
Pseudo R2	.698	.699	.7

Standard errors are in parentheses

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Sumber: Output STATA 16 (diolah kembali)

Variabel belanja signifikan berpengaruh terhadap kinerja tata kelola pemerintahan, hal ini membuktikan belanja yang dikelola oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan kompetisi antar pemerintah daerah yang mendorong efisiensi dan tata kelola yang lebih baik. Variabel kontrol yang signifikan adalah *dummy* yurisdiksi, pemerintah daerah dengan tipe kota berkorelasi positif terhadap variabel kinerja tata kelola pemerintahan. Sedangkan, variabel kontrol ukuran pemerintah, PDRB per kapita, dan wilayah pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan.

Tabel 2 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% belanja tahun sebelumnya, maka peluang kabupaten kota tersebut untuk mendapatkan kinerja baik dari kategori cukup meningkat sebesar 6,5% serta peluang kabupaten kota tersebut untuk mendapatkan kinerja kurang menurun menjadi kategori cukup sebesar 6,1%.

Artinya kabupaten kota yang memiliki belanja lebih tinggi akan cenderung menghasilkan kinerja yang baik, dengan asumsi variabel lain konstan (*ceteris paribus*). Hasil tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran dapat meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan (Goel et al., (2017); Kyriacou & Roca-Sagalés, (2011 dan 2009)). Tabel 2 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% DBH tahun sebelumnya, maka peluang kabupaten kota tersebut untuk mendapatkan kinerja baik dari kategori cukup meningkat sebesar 2,6% serta peluang kabupaten kota tersebut untuk mendapatkan kinerja kurang menurun menjadi kategori cukup sebesar 2,5%. Artinya kabupaten kota yang memiliki DBH lebih tinggi akan cenderung menghasilkan kinerja yang baik, dengan asumsi variabel lain konstan (*ceteris paribus*).

Tabel 2. Hasil Estimasi *Marginal Effect*

Variabel	Kategori SAKIP (<i>dy/dx</i>)					
	sangat kurang	kurang	cukup	baik	sangat baik	memuaskan
lag_BELANJA	-0.007**	-0.061**	-0.034**	0.065**	0.028**	0.009**
lag_GOVSZ	-0.001	-0.003	-0.001	0.003	0.001	0.001
lag_PDRBKPT	0.001	0.011	0.006	-0.012	-0.005	-0.002
lag_PAD	-0.001	-0.002	-0.001	0.002	0.001	0.001
lag_DBH	-0.003***	-0.025***	-0.014***	0.026***	0.011***	0.004***
lag_DAUDAK	0.001	0.003	0.002	-0.004	-0.002	0.001
DYURISDIKSI	-0.022**	-0.184**	-0.102**	0.196**	0.085**	0.027**
DPULAU	-0.026	-0.220	-0.122	0.234	0.102	0.032

Standard errors are in parentheses

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Sumber: Output STATA 16 (diolah kembali)

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal dari sisi pendapatan dapat meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan (Kyriacou & Roca-Sagalés, (2011 dan 2009)) dan menyebutkan bahwa dana bagi hasil dapat meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan (Saputra et al., 2018).

Tabel 2 juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan tipe kota berpotensi mendapatkan kinerja baik dari kategori cukup meningkat sebesar 19,6% serta berpotensi mendapatkan kinerja kurang menurun menjadi kategori cukup sebesar 18,4%. Hasil tersebut tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah kota memiliki tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan pemerintah daerah kabupaten (Saputra et al., 2018) dan sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa negara OECD memiliki tingkat kinerja yang lebih tinggi dibandingkan negara bukan OECD (Goel et al., 2017), dalam hal ini kota disejajarkan dengan negara kaya.

Analisis Heterogenitas (Sub Sample)

Berdasarkan hasil estimasi *Panel Ordered Probit Regression* Nasional dapat dilihat pada persamaan 3 bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kota dan kabupaten, dan pada persamaan 2 terdapat perbedaan yang signifikan antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa. Oleh karena itu untuk analisis yurisdiksi menggunakan persamaan dengan indikator pendapatan dan

pengeluaran, sedangkan analisis regional menggunakan persamaan dengan indikator pendapatan saja.

Hasil estimasi *Panel Ordered Probit Regression* kota dan kabupaten pada tabel 3 menunjukkan desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran maupun pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja tata kelola pemerintahan kota. Hasil estimasi pada yurisdiksi kota selaras dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa korelasi antara desentralisasi fiskal dengan kinerja tata kelola pemerintahan menjadi tidak signifikan pada negara yang berpenghasilan tinggi (Kyriacou & Roca-Sagalés, 2009), dalam hal ini kota disejajarkan dengan negara berpenghasilan tinggi. Penyebab DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja tata kelola pemerintahan kota karena pemerintah kota sudah memiliki pendapatan sendiri otonomi atau PAD yang cukup besar sehingga DBH yang diterima oleh pemerintah kota tidak material mempengaruhi pendapatan pemerintah kota.

Berbeda dengan kota, desentralisasi fiskal dari sisi pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kinerja tata kelola pemerintahan kabupaten. DBH berkorelasi positif signifikan pada tingkat 1% terhadap kinerja tata kelola pemerintahan, selain itu kabupaten yang berlokasi di pulau Jawa berkorelasi positif signifikan pada tingkat 1% terhadap kinerja tata kelola pemerintahan.

Tabel 3. Hasil Estimasi *Panel Ordered Probit Regression Analisis Heterogenitas*

	(1) Kota	(2) Kabupaten	(3) Luar Jawa	(4) Jawa
lag_PAD	.437 (.787)	.025 (.179)	.163 (.173)	-.469 (.794)
lag_DBH	.082 (.261)	.526*** (.141)	.51*** (.132)	-1.127*** (.421)
lag_DAUDAK	-1.226 (1.307)	-.08 (.07)	-.056 (.073)	1.611 (1.687)
lag_BELANJA	1.879 (1.228)	.404 (.471)		
lag_GOVSZ	.616 (1.86)	-.362 (.768)	1.404* (.73)	-3.098* (1.749)
lag_PDRBKPT	1.541 (1.662)	-.663 (.759)	.54 (.672)	-3.085 (2.67)
DPULAU	3.656 (6.673)	10.318*** (2.075)		
DYURISDIKSI			1.762 (1.399)	.558 (2.757)
/cut1	-3.61 (16.524)	-10.578** (4.482)	-7.453** (3.113)	1.452 (16.601)
/cut2	.282 (16.54)	-5.007 (4.444)	-1.92 (3.081)	5.04 (16.592)
/cut3	5.413 (16.514)	-1.874 (4.444)	1.248 (3.08)	9.559 (16.607)
/cut4	20.194 (383.255)	2.621 (4.443)	6.178** (3.085)	13.65 (16.617)
/cut5		6.218 (4.447)	10.861*** (3.123)	
Observations	556	2390	2268	678
Pseudo R ²	.744	.693	.683	.697

Standard errors are in parentheses *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$
 Sumber: Output STATA 16 (diolah kembali)

Tabel 4 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% DBH tahun sebelumnya, maka peluang kabupaten untuk mendapatkan kinerja baik dari kategori cukup meningkat sebesar 3,9% serta peluang kabupaten untuk mendapatkan kinerja kurang menurun menjadi kategori cukup sebesar 3,7%. Artinya kabupaten yang memiliki DBH lebih tinggi akan cenderung menghasilkan kinerja yang baik, dengan asumsi variabel lain

konstan (*ceteris paribus*). Hasil estimasi pada yurisdiksi kabupaten selaras dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa terdapat korelasi positif antara desentralisasi fiskal dengan kinerja tata kelola pemerintahan pada negara yang berpenghasilan tidak tinggi (Kyriacou & Roca-Sagalés, 2009), dalam hal ini kabupaten disejajarkan dengan negara berpenghasilan tidak tinggi.

Tabel 4. Hasil Estimasi *Marginal Effect Analisis Heterogenitas (Variable of Interest)*

	lag_DBH Kabupaten		lag_DBH Luar Jawa		lag_DBH Jawa	
	dy/dx	Standard Error	dy/dx	Standard Error	dy/dx	Standard Error
Sangat kurang	-0.005***	0.001	-0.005***	0.001		
Kurang	-0.037***	0.010	-0.036***	0.010	0.027***	0.010
Cukup	-0.016***	0.004	-0.012***	0.003	0.061***	0.021
Baik	0.039***	0.011	0.042***	0.012	0.013	0.010
Sangat Baik	0.013***	0.004	0.009***	0.003	-0.068**	0.026
Memuaskan	0.005***	0.001	0.001**	0.001	-0.032***	0.012

Standard errors are in parentheses *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$
 Sumber: Output STATA 16 (diolah kembali)

Hasil estimasi *Panel Ordered Probit Regression* pulau Jawa dan luar pulau Jawa pada tabel 3 menunjukkan desentralisasi fiskal dari sisi pendapatan yaitu DBH berpengaruh negatif signifikan pada tingkat 1% dan ukuran pemerintah berpengaruh negatif signifikan pada tingkat 10% terhadap kinerja tata kelola pemerintahan pada daerah yang berada di pulau Jawa. Tabel 4 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% DBH tahun sebelumnya, maka peluang pemerintah daerah di pulau Jawa untuk mendapatkan kinerja sangat baik menurun menjadi kategori baik sebesar 6,8% serta peluang pemerintah daerah di pulau Jawa untuk mendapatkan kinerja cukup dari kategori baik meningkat sebesar 6,1%. Artinya pemerintah daerah di pulau Jawa yang memiliki DBH lebih tinggi akan cenderung menghasilkan kinerja yang kurang baik, dengan asumsi variabel lain konstan (*ceteris paribus*). Namun, *marginal effect* pada pulau Jawa juga menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% DBH tahun sebelumnya, maka peluang pemerintah daerah di pulau Jawa untuk mendapatkan kinerja baik dari kategori cukup meningkat sebesar 1,3% tetapi tidak signifikan. Artinya ada hubungan positif walaupun tidak signifikan. Hal ini menandakan ada tingkat desentralisasi fiskal yang optimal karena hubungan desentralisasi fiskal dengan kinerja tata kelola pemerintahan bisa negatif atau positif tergantung pada tingkat desentralisasinya.

Hasil estimasi pada pemerintah daerah yang berada di pulau Jawa selaras dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal berkorelasi negatif dengan kualitas pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur (Andayani & Prasetya, 2013) serta desentralisasi fiskal lebih banyak menurunkan kinerja tata kelola pemerintahan pada negara yang berpenghasilan tinggi (Kyriacou & Roca-Sagalés, 2009), dalam hal ini pemerintah daerah di pulau Jawa disejajarkan dengan negara berpenghasilan tinggi. Pengaruh negatif dari DBH terhadap kinerja tata kelola pemerintahan pada daerah pulau Jawa dikarenakan keleluasaan atau kelonggaran penggunaan DBH dapat mendorong pemerintah daerah pada pulau Jawa untuk membuat program-program yang tidak produktif yang memicu ketidakefisienan dan ketidakefektifan (Nurchahyo & Mahi, (2022), Goel & Nelson, (2011)). Hasil estimasi variabel ukuran pemerintah terhadap

kinerja tata kelola pemerintahan berkorelasi negatif sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa semakin besar ukuran pemerintah maka semakin tinggi kemungkinan untuk korupsi pada pemerintah daerah di pulau Jawa (Saputra & Setiawan, 2021), dalam hal ini semakin tinggi korupsi diasumsikan semakin buruk kinerjanya. Pengaruh negatif dari ukuran pemerintah terhadap kinerja tata kelola pemerintahan pada daerah pulau Jawa dikarenakan ukuran pemerintah yang lebih besar (dalam hal pangsa PDRB) dikaitkan dengan kemungkinan birokrasi yang lebih besar di satu sisi akibatnya meningkatkan korupsi dan menurunkan kinerja tata kelola pemerintahan (Goel et al., 2017).

Berbanding terbalik dengan pulau Jawa, dana bagi hasil berpengaruh positif signifikan pada tingkat 1% dan ukuran pemerintah berpengaruh positif signifikan pada tingkat 10% terhadap kinerja tata kelola pemerintahan daerah yang berada di luar pulau Jawa. Tabel 4 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% DBH tahun sebelumnya, maka peluang pemerintah daerah di luar pulau Jawa untuk mendapatkan kinerja baik dari kategori cukup meningkat sebesar 4,2% serta peluang pemerintah daerah yang berada di luar pulau Jawa untuk mendapatkan kinerja kurang menurun menjadi kategori cukup sebesar 3,6%. Artinya pemerintah daerah yang berada di luar pulau Jawa yang memiliki DBH lebih tinggi akan cenderung menghasilkan kinerja yang baik, dengan asumsi variabel lain konstan (*ceteris paribus*). Hasil estimasi pada pemerintah daerah yang berada di luar pulau Jawa selaras dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal dan ukuran pemerintah berkorelasi positif dengan kinerja tata kelola pemerintahan pada negara yang berpenghasilan tidak tinggi (Kyriacou & Roca-Sagalés, 2009), dalam hal ini pemerintah daerah di luar pulau Jawa disejajarkan dengan negara berpenghasilan tidak tinggi.

Pada analisis sub sampel kabupaten/kota menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dari sisi pendapatan yang diprosikan oleh DBH mempunyai dampak yang lebih besar terhadap kinerja tata kelola pemerintahan jika dibandingkan dengan desentralisasi fiskal dari sisi

pengeluaran. Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa *marginal effect* desentralisasi pendapatan lebih besar dibandingkan desentralisasi pengeluaran (Canare, 2021), Canare menyatakan bahwa desentralisasi pendapatan harus melibatkan tidak hanya transfer tetapi yang sama pentingnya adalah memberi pemerintah daerah kemampuan untuk benar-benar mengumpulkan pendapatan.

Tabel 5 menunjukkan *marginal effect* variabel kontrol yang signifikan pada masing-masing kategori SAKIP. Pada analisis sub sampel kabupaten, variabel *dummy* pulau signifikan berdampak pada semua kategori kinerja tata kelola pemerintahan. Pemerintah kabupaten yang berlokasi di pulau Jawa berpotensi mendapatkan kinerja baik dari kategori cukup meningkat sebesar 75,9% dan berpotensi mendapatkan kinerja kurang menurun menjadi kategori cukup sebesar 71,7%. Peluangnya sangat besar jika dibandingkan dengan variabel ukuran pemerintah, hal ini membuktikan bahwa wilayah regional sangat berpengaruh terhadap kinerja tata kelola pemerintahan. Pulau Jawa memiliki infrastruktur dan layanan dasar yang jauh lebih baik dari luar pulau Jawa serta dukungan kapabilitas sumber daya manusia yang mumpuni mengakibatkan lebih mudah untuk meningkatkan kinerjanya.

Pada analisis sub sampel luar Jawa, variabel ukuran pemerintah signifikan berdampak pada semua kategori kinerja tata kelola pemerintahan. Setiap peningkatan 1% ukuran pemerintah (diproksi dengan konsumsi akhir pemerintah atau belanja pemerintah -dalam

ukuran PDRB) tahun sebelumnya, maka peluang pemerintah daerah yang berlokasi di pulau Jawa mendapatkan kinerja baik dari kategori cukup meningkat sebesar 12,4% dan berpotensi mendapatkan kinerja kurang menurun menjadi kategori cukup sebesar 10,8%. Hal ini mungkin dikarenakan masyarakat di luar Jawa masih terbatas dalam hal pendidikan dan ekonomi sehingga peran belanja pemerintah seperti belanja pegawai, belanja sosial, belanja barang dan jasa (non modal) dapat memenuhi preferensi masyarakat lokal sehingga meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan. Sedangkan pada analisis sub sampel Jawa, variabel ukuran pemerintah signifikan berdampak pada empat kategori kinerja tata kelola pemerintahan. Setiap peningkatan 1% ukuran pemerintah tahun sebelumnya, maka peluang pemerintah daerah yang berlokasi di pulau Jawa mendapatkan kinerja sangat baik menurun menjadi kategori baik sebesar 16,3% serta peluang pemerintah daerah di pulau Jawa untuk mendapatkan kinerja cukup dari kategori baik meningkat sebesar 18,3%. Namun, *marginal effect* pada pulau Jawa juga menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% ukuran pemerintah tahun sebelumnya, maka peluang pemerintah daerah di pulau Jawa untuk mendapatkan kinerja baik dari kategori cukup meningkat sebesar 3,1% tetapi tidak signifikan. Hal ini serupa dengan penjelasan sebelumnya, bahwa hubungan ukuran pemerintah dengan kinerja tata kelola pemerintahan bisa negatif atau positif tergantung pada tingkat belanjanya.

Tabel 5. Hasil Estimasi *Marginal Effect* Analisis Heterogenitas (Variabel Kontrol)

	DPULAU		lag_GOVSZ		lag_GOVSZ	
	Kabupaten		Luar Jawa		Jawa	
	dy/dx	<i>Standard Error</i>	dy/dx	<i>Standard Error</i>	dy/dx	<i>Standard Error</i>
Sangat kurang	-0.094***	0.022	-0.014*	0.008		
Kurang	-0.717***	0.144	-0.108*	0.056	0.074*	0.043
Cukup	-0.304***	0.067	-0.034*	0.018	0.163*	0.093
Baik	0.759***	0.154	0.124*	0.065	0.031	0.027
Sangat baik	0.264***	0.059	0.028*	0.015	-0.183*	0.104
Memuaskan	0.092***	0.021	0.004*	0.002	-0.086*	0.048

Standard errors are in parentheses

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Sumber: Output STATA 16 (diolah kembali)

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan beberapa simpulan penting. Pertama, terkait pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja tata kelola pemerintahan yang diukur melalui SAKIP pada kabupaten/kota di Indonesia menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dari sisi pendapatan diproksi melalui DBH dan dari sisi pengeluaran diproksi melalui belanja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja tata kelola pemerintahan.

Kedua, terkait dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja tata kelola pemerintahan akan berbeda atau seragam antar yurisdiksi dan regional menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja tata kelola pemerintahan pada yurisdiksi kabupaten dan kota serta pada regional Jawa dan luar Jawa. Dampak desentralisasi fiskal lebih besar pada pemerintah kabupaten dan pemerintah daerah yang berada di luar pulau Jawa. Dampak desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten sama besarnya dengan pemerintah daerah yang berada di luar pulau Jawa. Sedangkan pada pemerintah kota, desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja tata kelola pemerintahan. Lain halnya dengan pemerintah daerah yang berada di Jawa, desentralisasi fiskal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja tata kelola pemerintahan, tetapi hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ada tingkat optimal desentralisasi fiskal yang pada suatu titik tertentu dampaknya bisa menjadi positif. Hasil tersebut mengkonfirmasi sebagian besar temuan penelitian sebelumnya bahwa dampak desentralisasi fiskal melemah pada daerah berpenghasilan tinggi atau daerah maju.

Ketiga, terdapat perbedaan pengaruh desentralisasi fiskal dari sisi pendapatan (DBH) dan dari sisi pengeluaran (belanja) terhadap kinerja tata kelola pemerintahan. Dampak desentralisasi fiskal dari sisi pendapatan lebih besar dari sisi pengeluaran. Hasil ini juga sesuai dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan *marginal effect* desentralisasi pendapatan lebih besar dibandingkan desentralisasi pengeluaran.

Terakhir, wilayah regional dan ukuran pemerintah memegang peranan penting dalam

meningkatkan dan menurunkan kinerja tata kelola pemerintahan. Dampak pemerintah daerah yang berlokasi di Jawa atau luar Jawa sangat besar dalam menentukan kinerja tata kelola pemerintahannya. Pemerintah daerah yang berlokasi di Jawa berpeluang sangat besar untuk lebih baik kinerjanya. Sementara, dampak ukuran pemerintah berbeda antara pemerintah daerah yang berada di Jawa dan di luar Jawa. Pada pemerintah daerah yang berada di Jawa berdampak negatif signifikan, tetapi pada suatu titik tertentu dampaknya bisa menjadi positif. Sedangkan pada pemerintah daerah yang berada di luar Jawa berdampak positif signifikan.

Berdasarkan simpulan diatas, kebijakan desentralisasi fiskal merupakan hal penting dalam peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal masih harus dijadikan komponen utama strategi pembangunan khususnya dalam meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan. Desain desentralisasi fiskal dapat dari sisi pengeluaran maupun pendapatan. Saran terkait desain desentralisasi fiskal dari sisi pendapatan (DBH), pemerintah pusat perlu mendorong pemerintah daerah untuk menggali sumber DBH potensial. Sebagai contoh, ada penambahan jenis DBH baru yaitu: DBH perkebunan sawit. Pemerintah daerah perlu bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga kelestarian SDA potensial (antara lain: kehutanan dan perikanan) agar dapat berproduksi secara berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan DBH.

Saran terkait desain desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran (belanja), berdasarkan analisis nasional, belanja berhubungan positif signifikan terhadap kinerja tata kelola pemerintahan, tetapi pada analisis sub sampel belanja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, sebaiknya tidak melebihi-lebihkan dampak belanja terhadap kinerja tata kelola pemerintahan. Langkah yang dapat diambil adalah mengarahkan belanja pemerintah daerah ke sektor produktif agar belanja lebih efisien dan efektif serta memfokuskan belanja untuk perbaikan tata kelola pemerintahan seperti pemberian diklat untuk meningkatkan kapabilitas pegawai, pembuatan sistem informasi agar tata kelola pemerintahan lebih transparan dan akuntabel, dan sebagainya.

Pemerintah pusat perlu meningkatkan pengawasan terhadap implementasi belanja yang menggunakan DBH pada pemerintah daerah yang berada di pulau Jawa.

Saran lain terkait peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan. Pemerintah daerah yang berada di luar Jawa kesulitan untuk memperbaiki kinerja tata kelola pemerintahannya dibandingkan dengan pemerintah daerah yang berada di Jawa. Oleh karena itu, pemerintah pusat diharapkan dapat memfokuskan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar (seperti pendidikan dan kesehatan) di wilayah luar Jawa agar kapabilitas sumber daya manusia di luar Jawa meningkat dan berdampak pada kinerja tata kelola pemerintahan. Pemerintah daerah perlu mengkaji titik optimal ukuran pemerintah (belanja pemerintah daerah dalam pangsa PDRB) sehingga dampaknya positif bagi kinerja tata kelola pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, S., & Prasetya, F. (2013). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kualitas Pemerintahan dan Kinerja Ekonomi di daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 2 (2).
- Armstrong, M., dan Baron A. (2000). *Performance Management: The New Realities*. London: Institute of Personnel and Development.
- Bahl, R. (1999). *Implementation Rules for Fiscal Decentralization* (Issue January). https://mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/Rules_Fiscal_Decentralization.pdf
- Canare, T. (2021). Decentralization and development outcomes: What does the empirical literature really say? *Review of Public Economics*, 237(2), 111–151. <https://dx.doi.org/10.7866/HPE-RPE.21.2.5>
- Drajat, E. U., & Manzilati, A. (2015). Pengaruh Kualitas Pemerintahan Terhadap Penanaman Modal Asing (Studi Empiris Pada Negara ASEAN Tahun 2009-2013). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2370>
- Goel, R. K., Mazhar, U., Nelson, M. A., & Ram, R. (2017). Different forms of decentralization and their impact on government performance: Micro-level evidence from 113 countries. *Economic Modelling*, 62(January), 171–183. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.12.010>
- Goel, R. K., & Nelson, M. A. (2011). Government fragmentation versus fiscal decentralization and corruption. *Public Choice*, 148(3–4), 471–490. <https://doi.org/10.1007/s11127-010-9666-x>
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1–11. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>
- Juanda, B., Halim, A., Nasir, A., & Kaiwai, H. Z. (2013). *Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Belanja Daerah* (R. A. Simanjuntak & H. Handra (eds.)). Kementerian Keuangan.
- Kaufmann, D., & Kraay, A. (2002). Growth without Governance. *Economía*, 3(1), 169–229. <https://doi.org/10.1353/eco.2002.0016>
- Kyriacou, A. P., Muinelo-Gallo, L., & Roca-Sagalés, O. (2017). Regional inequalities, fiscal decentralization and government quality. *Regional Studies*, 51(6), 945–957. <https://doi.org/10.1080/00343404.2016.1150992>
- Kyriacou, A. P., & Roca-Sagalés, O. (2009). Fiscal decentralization and the quality of government: Evidence from panel data. *Hacienda Publica Espanola*, 189(2), 131–156.
- Kyriacou, A. P., & Roca-Sagalés, O. (2011). Fiscal decentralization and government quality in the OECD. *Economics Letters*, 111(3), 191–193. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2011.02.019>
- Linawati, Y., Suzantia, H., & Wibowo, M. G. (2021). Dampak Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Negara Berkembang OKI. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 4(2), 133–144. <https://doi.org/10.15575/jt.v4i2.12547>
- Martinez-Vazquez, J., Lago-Peñas, S., & Sacchi,

- A. (2017). the Impact of Fiscal Decentralization: a Survey. *Journal of Economic Surveys*, 31(4), 1095–1129. <https://doi.org/10.1111/joes.12182>
- Mudalige, P. W. (2019). The Discussion of Theory and Practice on Decentralization and Service Delivery. *European Scientific Journal ESJ*, 15(14), 115–135. <https://doi.org/10.19044/esj.2019.v15n14p115>
- Negara, B. P., & Khoirunurrofik, K. (2021). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Konvergensi Pendapatan Perkapita antar Kabupaten/Kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 1–18. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.185>
- Nurchahyo, A. D., & Mahi, B. R. (2022). Analisa Dana Transfer Pusat dan Probabilitas Terjadinya Korupsi di Tingkat Pemerintah Daerah. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 95–102. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.862>
- Purbadharmaja, I. B. P., Maryunani, I. B. P., Ananda, C. F., & Santoso, D. B. (2019). The implications of fiscal decentralization and budget governance on economic capacity and community welfare. *Foresight*, 21(2), 227–249. <https://doi.org/10.1108/FS-05-2018-0052>
- Rustiyaningsih, S., & Immanuela, I. (2014). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah. *Widya Warta*, 2(38), 190–203.
- Rusydi, M. K., & Rossieta, H. (2015). Good Public Governance Dan Indeks Pembangunan Manusia. *Proceeding SNA 18 Medan*, 1–18.
- Saputra, D. A., Ardila, L. N., Siddi, P., & Sutopo, B. (2018). Financial characteristics, human development index, and performance: a study of local governments in Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 22(2), 94–104. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss2.art2>
- Saputra, N. A. A., & Setiawan, D. (2021). Fiscal Decentralization, Accountability and Corruption Indication: Evidence from Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 13, 29–40. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.29-40>
- Sedyaningsih, P., & Zaky, A. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2012). 3(September), 1–47.
- Sujarwoto. (2015). Desentralisasi, tata kelola pemerintahan, dan kemiskinan di negara-negara berkembang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 1(1), 14–16.
- Vel, J. A. C., & Bedner, A. W. (2015). Decentralisation and village governance in Indonesia: The return to the nagari and the 2014 Village law. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 47(3), 493–507. <https://doi.org/10.1080/07329113.2015.1109379>
- Wardhani, R., Rossieta, H., & Martani, D. (2017). Good governance and the impact of government spending on performance of local government in Indonesia Ratna Wardhani *, Hilda Rossieta and Dwi Martani. *Int. J. of Public Sector Performance Management*, 3(1).